

**PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK  
PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**Oleh  
ADISTY GOBEL  
NIM. S.21.21.010**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TAHUN 2025**

# HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

## PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH :

**ADISTY GOBEL**

**NIM:S2121010**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Telah di setujui oleh Tim Pembimbng Pada Tanggal,29 April 2025

**Pembimbing I**



**Pembimbing II**

**Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si**  
**NIDN :0913027101**

**Swastiani Dunggio,S.IP., M.Si**  
**NIDN: 0930048307**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si**  
**NIDN: 0930048307**



## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

### PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATA BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH :

ADISTY GOBEL

NIM: S2121010

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji  
Pada Tanggal 03 Mei 2025 Telah Memenuhi Syarat

#### Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, S.IP., S.E., S.Psi., MM
2. Balada Raff, S.Sos., M.Si
3. Purwanto, S.IP., M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

.....

Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si  
NIDN:0913027101

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan

.....

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si  
NIDN:0930048307

## ***ABSTRACT***

### ***ADISTY GOBEL.S2121010.THE EFFECT OF THE ROLE OF THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION ON WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION IN BOLAANG UKI SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY***

This research aims to find the effect of the role of the General Elections Commission on women's political participation in Bolaang Uki Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency. This research employs an associative research type with a quantitative approach and applies a survey method. The sample size in this study is 45 people. The data analysis method used is simple linear regression analysis. The research results show that the Role of the General Elections Commission (variable X) affects women's political participation (variable Y) in the regional head election in Bolaang Uki Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency, by 0.772 or 77.2 percent. It indicates that the role of the General Elections Commission as the election organizer has been already good. However, some shortcomings still exist in several indicators of the role of the General Elections Commission.

**Keywords:** General Elections Commission, women's political participation

## ABSTRAK

### **ADISTYGOBEL.S2121010.PENGARUHPERANKOMISIPEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATANBOLAANGUKIKABUPATENBOLAANGMONGONDOW SELATAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan (variabel Y) pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 0,772 atau 77,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPU selaku penyelenggara pilkada sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada beberapa indikator peran KPU.

Kata kunci: peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi politik perempuan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan janganlah orang-orang tidak yakin meremehkan (janji-Nya)”  
(Q.s Ar-Ruum:60)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support sistem terbaik dan panutanku. terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringan tenaga dan fikiran. terimakasih untuk semua motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Keluarga besar tersayang,

Kakak, adik, keponakan dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril, semangat, dan doa dalam setiap fase perjalanan akademik ini. Kalian adalah tempat penulis pulang dan bertumbuh.

3. Dosen pembimbing yang luar biasa,

Yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketegasan, dan arahan yang membangun. Bimbingan dan masukan yang diberikan sangat berarti dalam menyempurnakan karya ini.

4. Teman-teman seperjuangan dan sahabat terbaik,

Yang selalu hadir memberikan semangat, saling membantu, serta menjadi tempat berbagi cerita dan tawa dalam setiap perjalanan akademik yang penuh tantangan ini. Kebersamaan kalian menjadi warna tersendiri dalam kehidupan kampus penulis.

5. Diriku sendiri,

Yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meski dalam keterbatasan dan tekanan. Terima kasih telah terus berjalan meski jalan tak selalu mudah.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adisty Gobel  
NIM : S2121010  
Konsentrasi : Politik  
Program Study : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “ PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN” adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar srjaana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun program tinggi lainnya.
2. Skripsi yang murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Gorontalo, juni 2025  
Yang membuat pernyataan

Adisty Gobel

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas selesainya Skripsi ini. Skripsi ini terinspirasi dari fenomena aktivitas politik perempuan pada pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah. Untuk itulah, penulis mengangkat judul PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam Skripsi ini, yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis, serta literatur yang digunakan. Untuk itulah, saran dan masukan perbaikan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima yang tak terhingga kepada kedua orangku yang sangat aku sayangi, mama NOVRITHA OINTU dan papa FULMAN GOBEL yang dengan tulus ikhlas mendidik, membesarkan dan membiayai pendidikan penulis. Tidak lupa juga, penulis ingin menyampaikan terima yang sedalam-dalamnya kepada: Bapak Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo; Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo; Bapak Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan juga selaku pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas masukan dan juga



koreksi perbaikannya; Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan sekaligus pembimbing II yang memberikan banyak masukan dan koreksi perbaikan; Seluruh Dosen, terutama bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan bantuan administrasi; dan Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2021 yang bersama-sama menuntut ilmu pengetahuan di kampus tercinta.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berdoa semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Gorontalo, April 2025

Penulis

**ADISTY GOBEL**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Konsep Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	9
2.2 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	10
2.3 Konsep Partisipasi .....	12
2.4 Konsep Politik.....	15
2.5 Konsep Partisipasi Politik.....	16
2.6 Partisipasi Politik Perempuan .....	19
2.7 Tantangan Perempuan Berpolitik .....	21
2.8 Kerangka Pemikiran.....	23
2.9 Hipotesis.....	24

### **BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1	Obyek Penelitian .....	26
3.2	Desain Penelitian.....	26
3.3	Operasionalisasi Variabel.....	26
3.4	Populasi dan Sampel .....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6	Teknik Analisis Data .....	32

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
4.1.1	Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	34
4.1.2	Misi.....	34
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
4.2	Hasil Penelitian.....	40
4.3	Tanggapan Responden .....	42
4.3.1	Peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X).....	43
4.3.2	Partisipasi Politik Perempuan (variabel Y).....	47
4.4	Hasil Uji Statistik.....	52
4.5	Pembahasan.....	55

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan .....	61
5.2.	Saran .....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Interpretasi koefisien korelasi.....	31
Tabel 4.1 Hasil uji validitas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) .	40
Tabel 4.2 Hasil uji validitas partisipasi politik perempuan (variabel Y) .....	41
Tabel 4.3 Uji reliabilitas peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) dan partisipasi politik perempuan (variabel Y) .....	42
Tabel 4.4 Tanggapan responden tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari pengenalan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, sampai kegiatan evaluasi hasil pemilihan kepala daerah.....	43
Tabel 4.5 Tanggapan responden tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepada pemilih pemula dan masyarakat yang memang belum paham mengenai politik.....	44
Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang KPU memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye .....	44
Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang KPU menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat .....	45
Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang KPU mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara .....	46
Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang KPU memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.....	46
Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang ikut dalam diskusi politik tentang pemilihan kepala daerah .....	47
Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan kampanye salah	

satu pasangan calon kepala daerah.....	48
Tabel 4.12Tanggapan responden tentang membentuk dan bergabung dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah.....	48
Tabel 4.13Tanggapan responden tentang ikut aktif berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan calon kepala daerah .....	49
Tabel 4.14Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan pengajuan sikap terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah .....	50
Tabel 4.15Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan demonstrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.....	50
Tabel 4.16Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan konfrontasi dengan pendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah .....	51
Tabel 4.17Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan mogok pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.....	51
Tabel 4.18Coefficientsperan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan .....	52
Tabel 4.19Tingkat korelasi dan determinasi antaraperan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan .....	54





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan ajang politik untuk memilih calon pemimpin yang akan memimpin suatu daerah untuk lima tahun ke depan. Tentunya kegiatan demokrasi ini membutuhkan dukungan masyarakat melalui partisipasi politik, agar dapat dipilih pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat yang akan dipimpinnya lima tahun ke depan. Dukungan berupa partisipasi politik masyarakat tersebut, tentunya diberikan oleh semua kelompok masyarakat, baik laki dan perempuan yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Partisipasi politik masyarakat diatur dalam pasal 2 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Partisipasi politik perempuan sebenarnya merupakan manifestasi dari pemenuhan kewarganegaraan. Perempuan sebagai warga negara memiliki hak untuk meningkatkan kehidupan mereka di bidang politik sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu diperlakukan secara diskriminatif. Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan minat, upaya, dan pendapat mereka, sementara pada saat yang sama memberikan pembenaran kepada proses politik dan para pemimpin terpilih. Fitriyah (2020: 154) menyatakan bahwa penting untuk mengakui bahwa partisipasi politik dalam fungsi

demokrasi sangat penting, tetapi perempuan dalam wacana politik, terutama dalam konteks umum pemilihan. Di satu sisi, ada pandangan yang berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan penting untuk mencapai tujuan kesetaraan gender dan memenuhi hak-hak perempuan. Di sisi lain, ada pandangan bahwa partisipasi perempuan dalam politik mungkin tidak diutamakan dalam politik.

Selama ini, partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum masih memprihatinkan. Pemilihan umum kepala daerah dan legislatif merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam sistem demokrasi kita. Indonesia telah melakukan upaya dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pemilu. Seiring dengan berjalannya persiapan pemilu legislatif 2024, peran perempuan semakin diakui dan partisipasi aktif mereka dalam penyelenggaraan pemilu legislatif didorong. Tentu saja, peran perempuan dalam pemilu tidak hanya sebatas sebagai pemilih saja, tetapi penting juga mereka dapat memainkan peran yang baik sebagai penyelenggara dan peserta pemilu. Rendahnya partisipasi politik perempuan dapat kita lihat dari sejumlah temuan data dari sejumlah hasil penelitian-penelitian. Data yang dihimpun oleh Inter-Parlementary Union (dalam Ikmal dan Arifin (2023), misalnya menyebutkan bahwa jumlah prosentasi kedudukan kursi perempuan yang hanya mencapai kurang dari 20% jelas menjadi keharusan partai politik untuk berusaha untuk mendorong pemberdayaan politik perempuan. Pada level global, posisi dan peran perempuan dalam partai politik hanya menempati porsi 10% dari jumlah keseluruhan 40-50% anggota partai.

Banyak regulasi yang sudah mendukung keikutsertaan perempuan dalam pemilu, baik sebagai penyelenggara maupun pemilih, dan implementasinya hanya membutuhkan dukungan mayoritas partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan agar paling sedikit 30% anggota kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah haruslah perempuan. Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa daftar calon anggota legislatif yang diajukan partai politik wajib memuat paling sedikit 30 persen perempuan. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Namun, data menunjukkan bahwa target 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen belum tercapai di tingkat pusat, negara bagian, dan kabupaten/kota. Di tingkat MPR RI, dari seluruh keanggotaannya, terdapat 161 perempuan (23%) dan 550 laki-laki (77%). Situasi serupa terjadi di DPR RI, di mana 119 perempuan (21%) dan 456 laki-laki (79%) menduduki kursi. Saat ini terdapat 42 perempuan (31%) dan 94 laki-laki (69%) di DPD RI. Bahkan di tingkat lokal, proporsi perempuannya di bawah 30%. Jumlah pemilih perempuan di negara ini mencapai 92.929.422, sedangkan jumlah pemilih laki-laki mencapai 92.802.671. Meskipun kesenjangan antara jumlah pemilih perempuan dan pemilih laki-laki tidak besar, kualifikasi untuk legislator perempuan belum mencapai standar 30 persen keterwakilan perempuan, yang tetap menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama (Maria Erni P, Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen, 2024). Lestari dan Hertanto (2024:154) mengatakan bahwa rendahnya

partisipasi perempuan dalam politik, apakah itu sebagai pemilih, aktivis, dan calon, menyebabkan rendahnya representasi perempuan dalam politik, yang seringkali mengakibatkan kebijakan yang membahas kebutuhan perempuan diabaikan. Misalnya, ketika perempuan menjadi lebih aktif secara politik melalui partisipasi langsung dalam proses elektoral, gerakan sosial dan organisasi politik, mereka tidak hanya dapat meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih tetapi juga memengaruhi agenda politik untuk mencakup lebih banyak isu yang berkaitan dengan perempuan.

Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, tingkat partisipasi masyarakat menurut Komisi Pemilihan Umum RI mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pemilihan presiden dan anggota legislatif, dimana presentase partisipasi pemilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 berada di angka 70-an persen. Demikian halnya juga terjadi pada pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, termasuk di Kecamatan Bolaang Uki. Hasil pengamatan dan dialog dengan warga masyarakat yang memiliki hak pilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, masih cukup tinggi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya, terutama dari kalangan perempuan. Pada umumnya, pemilih tidak menggunakan hak suaranya karena mereka menganggap bahwa semua calon kepala daerah yang akan dipilih, memiliki kualitas yang sama sehingga mereka beranggapan bahwa siapapun yang terpilih, semuanya sama saja. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berada di luar kota pada saat pelaksanaan pencoblosan, sehingga mereka tidak sempat balik. Di samping itu, ada

juga yang mengatakan bahwa mereka kurang memahami pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga kurang paham tentang pelaksanaan pilkada tersebut.

Terdapatnya warga masyarakat yang belum paham tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tentunya merupakan tantangan tersendiri untuk Komisi Pemilihan Daerah (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini karena salah satu faktor yang bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada, yakni KPU. Peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan dan sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, legialtif atau kepala daerah, sangat memainkan peranan penting terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang proses demokratisasi yang namanya pemilihan umum. Selama ini, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk memasyarakatkan kegiatan pemilihan umum (pemilu), diantaranya yakni kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, membuat pengumuman melalui media massa, seperti koran dan radio milik daerah, membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat di tempat umum yang banyak dilalui warga, dan mendata masyarakat dan menyusun daftar pemilih. Namun dalam pelaksanaannya. masih cukup besar juga warga yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasar data yang berasal dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, jumlah pemilih perempuan di Kecamatan Bolaang Uki yakni sebanyak 6.488 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah yakni 5.891, sedangkan yang tidak menggunakan hak

pilihnya sebanyak 597 orang atau 9,20% (Data KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tahun 2025).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi perempuan sudah cukup bagus, tetapi persentase perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya masih cukup tinggi, dan pada umumnya partisipasi perempuan di Kecamatan Bolaang Uki hanya pada saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja. Tentunya yang kita harapkan yakni perempuan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan politik, seperti menjadi anggota dan pengurus partai politik, legislator, calon kepala daerah, ikut serta dalam semua tahapan kegiatan pemilu, dan lain-lain. Hariyanti, dkk (2018) mengatakan partisipasi politik mengacu pada bentuk partisipasi aktif individu atau kelompok dalam membuat keputusan dan keputusan politik, sehubungan dengan pemerintah atau negara. Kegiatan politik ini merupakan aspek penting dalam masyarakat yang demokratis dan merupakan salah satu kolom utama untuk mempertahankan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk mengkajinya lebih dalam lagi melalui sebuah penelitian dengan judul “PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN”

## **1.2 Rumusan Masalah**



Rumusan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

Seberapa besar pengaruh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian, yakni:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis

Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah Kecamatan Bolaang Uki, penelitian ini penting karena dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kecamatan Bolaang Uki dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada umumnya.

2. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut tentang peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan

3. Kegunaan bagi peneliti

Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah, sekaligus mendapat pengetahuan dan informasi mengenai arti penting mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Untuk menyelenggarakan pemilihan dibentuk Komisi Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan sebutan KPU. Putri (2016:34). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah organisasi pemilihan nasional, konstan dan independen. Negara mencerminkan bidang pekerjaan dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah terpadu Republik Indonesia.

Salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah tugas yang melekat, juga menjadi bagian yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparan dan profesional, dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, sehingga menghasilkan kepala daerah yang legitimat. Pelbagai upaya yang dilakukan oleh KPU dalam merumuskan dan menyusun program-program strategis, seperti melakukan sosialisasi, dengan memanfaatkan pelbagai media sosialisasi.

KPU merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu presiden dan wakil presiden, legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Megawati dan Padang, 2020:523).

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu pemegang kunci pemilu yang demokratis dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur, dan adil harus bisa bersikap netral artinya tidak memihak pada salah satu kelompok tertentu atau kepada pihak tertentu. Kenetralan KPU dapat membuat masyarakat sebagai pemilih hak pilih tidak akan memberi pandangan pada sistem pemilu yang kotor, atau curang, dikarenakan sikap KPU yang netral. Partisipasi politik masyarakat dalam hal ini akan menyumbangkan faktor keberhasilan pemilu yang diselenggarakan. Selain itu, dalam diri KPU integritas dan independensi antar anggota sangatlah penting. Kesatuan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu tanpa adanya paksaan atau ancaman serta sesuai dengan hati nuraninya merupakan bentuk independensi lembaga KPU

## **2.2 Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Menurut Nugroho dan Sukmariningsih (2020:27), untuk meningkatkan partisipasi politik dapat dilakukan dengan cara:

- a) Melakukan sosialisasi ke masyarakat

Pelaksanaan pemilihan umum terdiri dari beberapa tahapan yang tentunya membutuhkan sosialisasi, agar dapat diketahui oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU dapat berupa sosialisasi pada kalangan Sekolah Menengah Atas sebagai pengantar untuk pemuda untuk terlibat dalam pemilihan atau mengunjungi

kesadaran politik dan beberapa elemen masyarakat yang benar-benar membutuhkan nasihat kepada mereka yang tidak memahami demokrasi atau politik. Ini karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya bertindak sebagai koordinator, sehingga terlalu banyak kegiatan dan kegiatan tidak dilakukan dalam bentuk kegiatan program masyarakat. Sosialisasi juga dapat dilakukan di kamar tatap muka dengan pertanyaan dan jawaban yang dibuat melalui media komunikasi interaktif dan melalui interaksi televisi dan media radio yang dikirim langsung dalam program dialog politik. Selain itu, format aktivitas KPU juga menggunakan berbagai kegiatan dan model media.

b) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga

Alat peraga kampanye merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diundangkan, tepatnya tanggal 14 Juli 2023. Kampanye pemilihan Umum menerangkan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol. Dalam mengsosialisasikan pemilihan kepala daerah, KPU dapat menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul.

c) Sosialisasi melalui media massa, seperti: radio dan surat kabar

Sosialisasi melalui media juga memainkan peran krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap

pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat perlu disampaikan secara luas melalui berbagai saluran media. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik akan memperkuat legitimasi Pemilu serta mendorong terwujudnya representasi yang lebih akurat dari kehendak rakyat. Melalui media, informasi mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara dapat dijelaskan dengan lebih mendalam kepada masyarakat. Media massa dapat menjadi alat untuk mengedukasi, mempersiapkan, dan membimbing masyarakat menuju proses Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Sejalan dengan peran media dalam sosialisasi, pengawasan partisipatif juga menjadi fokus utama. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi pengawas aktif terhadap proses Pemilu, dan media memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan tersebut.

### **2.3 Konsep Partisipasi**

Keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan politik sangat penting dan menentukan, karena masyarakatlah yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Tjokroamidjojo (2003:72), mengatakan partisipasi adalah suatu kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan atas kesukarelaan, ia menjadi mobilisasi apabila terdapat kekuasaan ekstern yang mengerjakan kegiatan tertentu (untuk kepentingan masyarakat itu sendiri) suatu pekerjaan gotong-royong.



Kemudian, Hoofsteede dalam Khairuddin (2002:124) mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Proses yang dimaksud dalam hal ini tentu saja proses pembangunan. Menurut Bhattacharyya dalam Ndraha (2002:102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

Gaventa dan Valderama diKUTIP Arsito (200) menunjukkan bahwa ada konsep partisipasi tradisional, terutama ketika berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis. Yaitu, 1) partisipasi politik, 3) partisipasi social. ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Partisipasi politik dalam lembaga pemerintah di mana "pengaruh" dan "perwakilan rakyat" secara aktif menanggapi proses pemerintah itu sendiri.
- b) Partisipasi sosial, partisipasi akan digunakan sebagai partisipasi masyarakat. Secara khusus, mereka yang dianggap sebagai manfaat atau pihak selain proses pengembangan, sehubungan dengan saran atau pengambilan keputusan di semua tahap siklus proyek pengembangan, dari penilaian evaluasi, implementasi, penelitian, kebutuhan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya diimplementasikan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, meskipun tujuan utama dari proses partisipasi sosial sebenarnya bukan ketertiban umum, dimasukkannya komunitas di dunia ketertiban umum kemungkinan didasarkan pada pembelajaran dan mobilitas

social. Pada hakikatnya partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subyek dan bukan obyek pembangunan. Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

- c) Partisipasi warga, menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum terisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga ketimbang menjadikan arena kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

## **2.4 Konsep Politik**

Almond dalam Ramadhani, dkk (2022:21) mengonsepan politik sebagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan pengambilan keputusan publik - produksi

di masyarakat tertentu di bidang tertentu di mana kontrol ini didukung oleh cara -cara penting yang terkait dengannya.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood dalam Ramadhani, dkk (2022:21), politik ialah aktivitas suatu negara yang ditujukan untuk peraturan umum yang mengatur kehidupan mereka. Dengan kata lain, itu tidak dapat dipisahkan dari gejala konflik atau kerja sama.

Al-Banna (2000:127) mengatakan bahwa politik ialah memikirkan masalah internal dan eksternal orang. Halaman internal harus menyadari pertanyaan pemerintah, menjelaskan fungsinya, kewajiban detail dan hak, mengawasi para penguasa, mengikuti apakah mereka berbuat baik atau tidak, dan mengkritik apakah mereka telah melakukan kesalahan. Bagian luarnya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan rakyat, tetapi mereka menggunakan posisi mereka di tengah -tengah negara lain dan mencapai tujuan membebaskan mereka dari penindasan dan intervensi aktor lain dalam masalah mereka. Berdasarkan persepsi ini, Banna mengatakan bahwa umat Islam tidak sempurna dalam Islam. Islam manusia memintanya untuk memperhatikan masalah negara.

## **2.5 Konsep Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah aspek penting dalam proses berdemokrasi, karena melalui partisipasi politik masyarakat inilah para kontestan politik

memperoleh legitimasi dari masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka semakin besar pula legitimasi kontestan yang terpilih. Olehnya itu, partisipasi politik masyarakat merupakan indikator dukungan masyarakat terhadap para kandidat kepala daerah atau para kontestan pemilu.

Putri (2016:35) partisipasi politik secara harafiah berarti partisipasi, dan dalam konteks politik, ini mengacu pada partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Definisi partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik.

Budiarjo (2018:367) mengatakan bahwa partisipasi politik ialah aktivitas seseorang atau kelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (pegawai negeri).

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah memilih pemimpin dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Hal ini wujud dari negara yang demokratis. Namun, tidak semua orang memiliki kesadaran politik yang tinggi, terdapat beberapa alasan seperti pendidikan yang rendah, sosialisasi yang kurang, dan stigma “politik” yang identik dengan perebutan kekuasaan menjadikan masyarakat seringkali bersikap apatis terhadap dunia politik Indonesia. Faktor-faktor yang menjadikan partisipasi politik masyarakat kurang terutama dalam memberikan suaranya dalam pilkada, dapat ditemukan dalam penyelenggaraan pilkada di setiap daerah.

Kamisi dari Ruslan (2005:6) menawarkan pemahaman yang luas tentang partisipasi politik bahwa melalui partisipasi administratif dalam hukum, partisipasi politik berbicara hak untuk mendiskusikan diri dalam berbagai organisasi yang memainkan peran dalam kehidupan politik, dan dalam berbagai organisasi yang berpartisipasi dalam berbagai tindakan dan gerakan yang berpartisipasi dalam berbagai organisasi yang berpartisipasi dalam berbagai organisasi mandiri. Dengan keterampilannya sendiri. Dalam implementasi, partisipasi tinggi menunjukkan bahwa warga negara ingin mengikuti masalah politik dan terlibat dalam kegiatan ini. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap sebagai indikasi yang buruk, karena banyak penduduk dapat diartikan sebagai tidak memperhatikan masalah negara (Miriam Buriardjo, 2018:369)

Peran serta masyarakat dalam partisipasi politik bisa dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Dalam pasal 31 UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pelibatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui partai politik maupun non partai politik. Salah satu partisipasi masyarakat yang dapat dilakuan lewat partai politik adalah mengikuti dan aktif dalam

kegiatan pendidikan politik, sehingga dapat mengartikulasi dan memperjuangkan gagasan, ide dan pemikiran politiknya lewat partai politik (Suropati, 2023:10-11).

Masyarakat ikut berpartisipasi tentunya memiliki tujuan dan keinginan yang akan diperolehnya. Ramlan Surbakti (2016:10) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik pada seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik pemerintah (sistem politik). Apa arti persepsi politik adalah persepsi hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak -hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dll.

Selanjutnya, ada satu faktor (tidak ada variabel independen). Ini berarti bahwa dua faktor yang lebih rendah dipengaruhi oleh faktor -faktor lain seperti: B. Status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Status sosial berarti posisi seseorang berdasarkan warisan, pendidikan, pekerjaan, dll. Selain itu, status ekonomi adalah posisi seseorang dari kelas sosial berdasarkan kepemilikan kemakmuran. Seseorang yang mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan Surbakti, 2016:144-145).

## **2.6 Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi adalah hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dan tidak langsung dalam proses pemilihan. Ini sama dengan pertimbangan. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan lokal utama disebabkan oleh beberapa alasan masyarakat. Fenomena ini

bermasalah karena keberhasilan implementasi pemilihan markas lokal didasarkan pada partisipasi politik masyarakat.

Warjiyati (2016) menyatakan bahwa partisipasi politik perempuan pada dasarnya adalah kegiatan sukarela perempuan yang merupakan anggota komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus terdiri dari berbagai elemen, termasuk pengamat politik, aktivis, dosen, perempuan di parlemen, dan eksekutif partai perempuan, dan berpartisipasi dalam pemilihan otoritas partisan secara langsung dan tidak langsung dalam pendidikan politik umum. Secara umum, partisipasi bukan hanya bidang politik, tetapi juga bidang semua kehidupan. Perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif atau aktif, sehingga mereka membutuhkan perjuangan dan semua wanita secara umum dalam arti politik yang memengaruhi produk politik.

Almond dalam Mas'ood (2017:57-58) partisipasi politik terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) Partisipasi politik konvensional

Partisipasi politik tradisional adalah bentuk partisipasi politik normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat daripada dalam bentuk kekerasan.

Partisipasi ini adalah

Pemberian suara atau voting

- a) Diskusi politik
- b) Kegiatan kampanye

- c) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
  - d) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2) Partisipasi politik non konvensional

Partisipasi politik non-tradisional adalah bentuk partisipasi politik, bahkan dalam bentuk tindakan ilegal atau kekerasan, yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sesuai sesuai dengan kemungkinan. Dengan kata lain, format partisipasi ini

- a) Pengajuan petisi
- b) Berdemonstrasi
- c) Konfrontasi
- d) Mogok
- e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda pengrusakan, pemboman, pembakaran
- f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

## **2.7 Tantangan Perempuan Berpolitik**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif mengamalkan keterwakilan kuota 30% perempuan dalam pemilihan legislatif. Aturan ini sudah dapat diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009. Namun, pemberian kuota 30% yang niat awalnya untuk meningkatkan representasi kaum perempuan ini nyatanya tidak di setujui sebagian kaum perempuan itu sendiri.

Perempuan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam berpartisipasi dalam politik. Salah satu tantangan utama adalah stereotip gender yang mendalam



yang masih ada dalam masyarakat. Banyak orang masih percaya bahwa politik adalah domain laki-laki dan bahwa perempuan harus tetap di rumah dan merawat keluarga. Selain itu, perempuan juga menghadapi tantangan dalam hal akses ke sumber daya, seperti pendidikan dan pelatihan politik, serta dukungan finansial untuk kampanye. Diskriminasi dan pelecehan seksual juga merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh perempuan dalam politik.

Perjuangan perempuan haruslah sejalan dengan perjuangan kemajuan pemikiran dan perubahan kebudayaan. Karena tantangan perempuan ada dalam dua bidang ini. Tanpa ada perubahan dalam dua bidang tersebut tidak akan ada perbaikan yang berarti. Pemikiran dan kebudayaan sangat berpengaruh pada kualitas hidup perempuan. Saat ini, di Indonesia kualitas pemikiran dengan kualitas kebudayaan perempuan semakin mundur. Kemajuan hanya terlihat secara kuantitas. Kuantitas tanpa substansi sama saja tidak ada kemajuan.

Menurut Mariana Amiruddin dalam (Sudarsono, 2019), keterlibatan perempuan dalam politik saat ini masih terbawa arus utama kecenderungan cara orang berpolitik. Walaupun mereka sampai duduk di parlemen, efek baiknya pada nasib perempuan belum terasa sampai sekarang. “Ganjalan mereka pertama, yang terpilih kebanyakan perempuan yang tidak punya semangat memperjuangkan hak-hak perempuan. Kedua, walaupun iya masih terbentur pada kebijakan partai. Ketiga, terbentur pada kebijakan parlemen yang sifatnya lebih komunal (beramai-ramai) sehingga yang diperhitungkan masih suara terbanyak,” Masih menurut Mariana, tantangan kaum perempuan masih

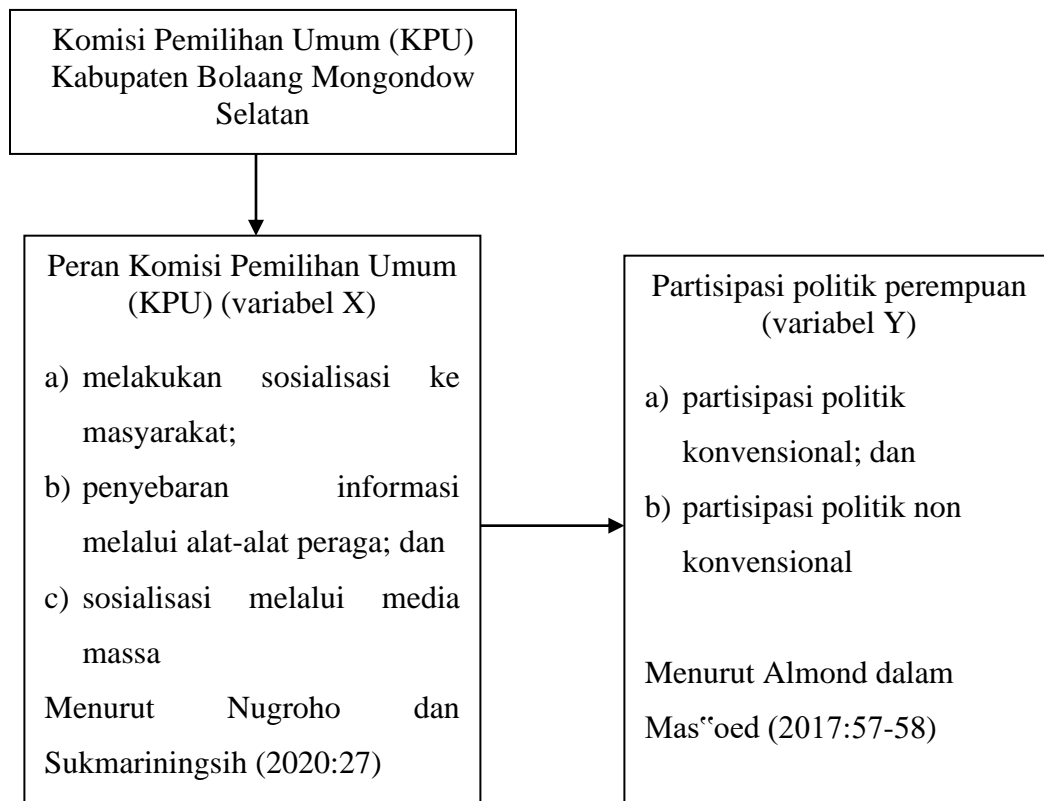
pada budaya yang kurang menganggap perempuan pantas tampil di bidang politik formal. Peluang akan bisa di raih bila perempuan yang tampil berkali lipat berani meskipun pandangannya berbeda dengan politisi lain, diantaranya berani bersuara, berani bertarung, dan berani apa yang dilakukannya betul-betul untuk mencapai keadilan. Belum adanya political will dari partai politik merupakan tantangan berikutnya. Menurut Fazia, partai politik masih belum menganggap pentingnya perempuan dalam politik. Partai politik masih di dominasi oleh laki-laki. Sekalipun mereka merekrut perempuan, mereka lebih memilih perempuan yang populer, seperti artis. “Ini adalah pertimbangan pragmatis karena artis hanya ‘dimanfaatkan’. Artis dijadikan vite gatter”.

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, perempuan membentuk setengah dari populasi dan oleh karena itu, mereka harus diwakili secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, perempuan sering kali memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda dari laki-laki, yang dapat memberikan kontribusi penting untuk pembuatan kebijakan. Ketiga, penelitian telah menunjukkan bahwa ketika perempuan terlibat dalam politik, ada peningkatan dalam isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial.

## **2.8 Kerangka Pemikiran**

Tinggi dan rendahnya partisipasi politik masyarakat, termasuk partisipasi perempuan dalam politik, sedikit banyaknya ditentukan oleh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nugroho dan Sukmariningsih (2020:27) mengatakan bahwa untuk

meningkatkan partisipasi politik perempuan oleh KPU, dapat dilakukan dengan cara; a) melakukan sosialisasi ke masyarakat; b) penyebaran informasi melalui alat-alat peraga; dan c) sosialisasi melalui media massa, seperti: radio dan surat kabar. Adapun partisipasi politik perempuan, menurut Almond dalam Mas'ood (2017:57-58) terbagi dalam dua bentuk, yaitu: a) partisipasi politik konvensional; dan b) partisipasi politik non konvensional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat digambarkan kerangka pikir, yakni: Dari uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut.



## **2.9 Hipotesis**

Menurut Riduwan (2018:35) hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah:

Ha : peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ho : peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi objek dari penelitian ini yakni pengaruh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini ialah tiga bulan.

#### **3.2. Desain Penelitian**

Saat melakukan penelitian ini, penulis memilih jenis studi asosiasi dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2018:8) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filosofi positivis dan digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian adalah analisis data kuantitatif/statistik yang ditujukan untuk menguji hipotesis yang ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai

#### **3.3 Operasionalisasi Variabel**

Untuk memudahkan pengukuran variabel penelitian, maka perlu mengoperasionalkan variabel penelitian.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah aktivitas atau kegiatan KPU untuk mengsosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah kepada masyarakat, dalam hal perempuan agar mereka mengambil bagian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di wilayahnya, yang meliputi:

- a) Melakukan sosialisasi ke masyarakat, yaitu kegiatan memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari pengenalan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, sampai kegiatan evaluasi hasil pemilihan kepala daerah.
- b) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga yakni kegiatan memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul.
- c) Sosialisasi melalui media massa, yakni kegiatan memperkenalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara. Sosialisasi melalui media massa dapat dijelaskan dengan lebih mendalam kepada masyarakat, seperti: radio dan surat kabar.

Partisipasi politik perempuan ialah keterlibatan secara aktif dalam pemilihan kepala daerah, mulai dari sosialisasi calon kepala daerah, kegiatan kampanye,

pelaksanaan pemilihan kepala daerah sampai perhitungan hasil suara calon kepala daerah, yang meliputi:

- a) Partisipasi politik konvensional ialah adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan.
- b) Partisipasi politik non konvensional ialah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa tindakan yang ilegal dan tindakan kekerasan

Menjalankan tes pada setiap variabel diukur dengan memakai skala Likert. Survei disiapkan oleh (5) menyiapkan keputusan. Dengan kata lain, selalu, sering, kadang -kadang, tidak biasa. Setiap opsi menerima nilai yang berbeda mulai dari 1 hingga 5

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Sugiyono (2018:90) berkata populasi adalah area generalisasi yang ada. Objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik spesifik yang dapat diselesaikan oleh para peneliti setelah peneliti telah diselidiki. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran adalah masyarakat perempuan yang memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **3.4.2 Sampel**

Sampel menurut Sugiyono (2018:91) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Agar mendapat sampel yang menggambarkan karakteristik populasinya secara tepat, dalam hal ini, dua faktor tergantung pada metode sampel dan penentuan ukuran sampel untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan karakteristik populasi yang tepat. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini besar, maka penulis akan melakukan penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu masyarakat perempuan yang memilih hak pilih pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang berjumlah 40 orang.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

Kuesioner yaitu, daftar pertanyaan yang berisi indikator peran komisi pemilihan umum dan partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### **3.5.1 Prosedur Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang sangat baik dalam arti nyata, tentu saja, Anda memerlukan keberadaan peralatan atau peralatan pengumpulan data yang sangat baik, dan yang terpenting, perangkat pengukuran yang efektif dan andal. Selain itu, instrumen yang valid dan andal atau instrumen pengukuran harus menghasilkan data



objektif ketika digunakan untuk percaya bahwa validitas dan keandalan harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan.

#### 3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2006:219), validitas ialah ukuran yang menunjukkan bahwa validitas atau validitas instrumen yang relevan dapat diukur. Tes validitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap instruksi dengan jumlah titik di setiap variabel. Selanjutnya, saat menafsirkan koefisien korelasi. Menurut Masrun dikutip Sugiyono (2018:106) berkorelasi positif dengan kriteria (jumlah total poin), dan memiliki korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa artikel ini juga sangat efektif. Untuk pengujian menggunakan rumus mentah sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i) \cdot (\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana:

r = koefisien Korelasi

X = Peran KPU

Y = Partisipasi politik perempuan

n = banyaknya sampel

Selanjutnya di hitung dengan uji t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = nilai t hitung

n = jumlah responden

r = koefisien korelasi hasil r hitung

Kemudian nilai korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan ditransformasi ke nilai t-hitung dan dibandingkan dengan tabel-t pada derajat bebas (n-2). Bila nilai t-hitung nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t-hitung dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid.:

Tabel 3.1  
Interpretasi koefisien korelasi

<b>r</b>	<b>Keterangan</b>
0,000 - 0,199	Korelasi sanngat rendah
0,200 - 0,399	Korelasi rendah
0,400 - 0,699	Korelasi sedang
0,700 - 0,899	Korelasi tinggi
0,900 - 1,000	Korelasi sangat tinggi

### 3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Tes reliabilitas atau reliabilitas bertujuan untuk mengukur keandalan perangkat pengukuran dengan memberi responden skor yang relatif mirip. Ini dimaksudkan untuk apakah alat untuk pengambilan data menunjukkan gejala spesifik dari sekelompok orang, meskipun berjalan pada pertanyaan yang valid

Pengujian realibilitas menggunakan tes konsistensi internal dengan rumus *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). *Cronbach Alpha* dapat digunakan untuk menguji reliabilitas instrument skala Likert (1 sampai 5) atau instrument yang item-itemnya dalam bentuk esai, dan memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang dapat diterima jika nilai keofisiennya reliabilitas yang terukur adalah variabel  $\geq 0,60$  atau 60%.

Rumus yang digunakan yaitu rumus alfa cronbach ( $\alpha$ ) yaitu :

$$\alpha = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum a^2}{a1^2} \right)$$

Dimana:

$\alpha$  = Relibilitas intrument

$k$  = Banyaknya pertanyaan

$\sum a^2$  = Jumlah pertanyaan

$a1^2$  = Total varians

### **3.6. Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Rancangan Uji Hipotesis**

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di

Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana dapat dilihat pada gambar berikut:

Metode regresi sederhana



X : Peran KPU

Y : Partisipasi politik perempuan

### 3.6.2 Pengujian Hipotesis

Persamaan regresi:

$$\hat{Y} = a + bX$$

$$\sum Y - b \cdot \sum X$$

$$a = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

$$n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y$$

$$b = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan:

a : Nilai konstan atau harga Y jika X = 0

b : Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**

Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkuaitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah kesatuan republik indonesia.

##### **4.1.2. Misi**

- a) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
- b) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif.
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokratis

#### **4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1. Ketua (KPU) komisi pemilihan umum:**

Ketua komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten bolaang mondow selatan,  
Stenly E. Kakunsi,

Memiliki tugas pokok yang sesuai dengan ketentuan nasional yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sebagai ketua KPU Kabupaten/Kota, beliau bertanggung jawab memimpin

penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilu legislatif.

Tugas pokok ketua KPU kabupaten bolaang mongondow selatan:

### **Memimpin dan Mengelola KPU Kabupaten**

- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten.
- Bertindak atas nama KPU Kabupaten dalam hubungan internal dan eksternal.
- Memberikan keterangan resmi mengenai kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten.
- Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi.
- Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan koordinator wilayah.
- Menandatangani seluruh keputusan KPU Kabupaten.

### **Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

- Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan.
- Menyusun dan menetapkan tata kerja serta pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- Menetapkan calon bupati/walikota yang memenuhi persyaratan.
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara serta menyerahkannya kepada pihak terkait.
- Menerbitkan keputusan untuk mengesahkan hasil pemilihan dan mengumumkannya.
- Mengumumkan calon terpilih dan membuat berita acaranya.
- Melaporkan hasil pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- Menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

### **Administrasi dan Logistik**

- Mengkoordinasikan administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan.
- Mengelola protokol dan persidangan.
- Mengelola dan melaporkan barang milik negara.
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat.



- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi**

### **Tugas Pokok:**

- Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran KPU.
- Mengelola data pemilih (DPT, DP4, DPS).
- Mengelola dan menyajikan informasi pemilu kepada publik.
- Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan instansi lainnya dalam pemutakhiran data pemilih.
- Mengelola sistem informasi pemilu.

### **3. Divisi Teknis Penyelenggaraan**

#### **Tugas Pokok:**

- Menyiapkan teknis pelaksanaan pemilu (tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara).
- Mengelola proses pendaftaran dan verifikasi partai politik serta calon kepala daerah atau calon legislatif.
- Menetapkan jadwal kampanye dan tata cara teknisnya.
- Mengelola logistik pemilu.
- Melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada PPK, PPS, KPPS.

### **4. Divisi Hukum dan Pengawasan**

#### **Tugas Pokok:**

- Menangani permasalahan hukum terkait tahapan pemilu.
- Mengelola sengketa proses pemilu.
- Menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan pemilu.
- Memonitor dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi dari Bawaslu.
- Mengawasi kinerja internal (kode etik, disiplin penyelenggara).

## **5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM**

### **Tugas Pokok:**

- Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- Mengelola komunikasi publik (media sosial, website, spanduk, dll).
- Melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS).

Melaksanakan pelatihan dan pengembangan SDM penyelenggara.

### **4.2. Hasil Penelitian**

Langkah pertama sebelum membahas hasil tanggapan responden tentang variabel yang diteliti, yakni peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas kuesioner yang diartikan kepada kuesioner.

#### **4.2.1. Uji validitas kuesioner**

Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya. Ketentuannya ialah bahwa kuesioner dikatakan

valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Adapun hasil uji validitas kuesioner penelitian, dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1 Hasil uji validitas peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)

Variabel	Jumlah pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel} = 0,301$
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)	1	0.925	0,301
	2	0.874	0,301
	3	0.885	0,301
	4	0.856	0,301
	5	0.861	0,301
	6	0.866	0,301

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa kuesioner untuk mengukur peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) diberikan enam pertanyaan, dimana tampak bahwa keenam pertanyaan tersebut memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  (nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ ), sehingga disimpulkan bahwa keenam pertanyaan untuk mengukur variabel peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan valid.

Tabel 4.2 Hasil uji validitas partisipasi politik perempuan (variabel Y)

Variabel	Jumlah pertanyaan	$r_{hitung}$	$r_{tabel} = 0,301$
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)	1	0.880	0,301
	2	0.897	0,301
	3	0.854	0,301
	4	0.876	0,301
	5	0.835	0,301
	6	0.856	0,301
	7	0.839	0,301
	8	0.850	0,301

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kuesioner untuk mengukur partisipasi politik perempuan (variabel Y) diberikan delapan pertanyaan, dimana tampak bahwa kedelapan pertanyaan tersebut memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari nilai  $r$  tabel (nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel), sehingga disimpulkan bahwa kedelapan pertanyaan untuk mengukur variabel partisipasi politik perempuan dinyatakan valid.

#### 4.2.2. Uji reliabilitas kuesioner

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *cronbach's alpha*, di mana hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Uji reliabilitas peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) dan partisipasi politik perempuan (variabel Y)

variebal penelitian	jumlah pernyataan)	Nilai reliabilitas	cronbach's alpha
Komisi Pemilihan Umum (variabel X)	6	0,60	0,961
Partisipasi politik perempuan (variabel Y)	8	0,60	0,964

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel 4.3 tentang hasil uji reliabilitas terhadap peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) dan partisipasi politik perempuan (variabel Y), dapat dijelaskan sebagai berikut: peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) berisi enam pertanyaan dan didapat hasil *cronbach's alpha* sebesar 0,961. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga *cronbach's alpha*  $0,961 > 0,60$ . Kemudian, partisipasi politik perempuan (variabel Y) berisi delapan pertanyaan dan didapat hasil *cronbach's alpha* sebesar 0,964. Nilai ini lebih besar dari nilai standar yakni 0,60, sehingga *cronbach's alpha*  $0,964 > 0,60$ . Hal ini berarti bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan reliabel atau terpercaya sebagai pengumpul data dalam penelitian ini.

#### **4.3. Tanggapan Responden**

Berdasarkan daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner penelitian, terdapat empat belas pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab, dan hasilnya bahwa semua pertanyaan tersebut sudah valid dan andal, sehingga dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian, yakni peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) dan partisipasi politik perempuan (variabel Y).

##### **4.3.1. Peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X)**

Peran Komisi Pemilihan Umum (variabel X) merupakan variabel pertama yang berisi enam pertanyaan, dan semuanya telah dijawab oleh responden sebanyak 45 orang. Berikut tanggapan responden terkait peran Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 4.4

Tanggapan responden tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari pengenalan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, sampai kegiatan evaluasi hasil pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	16	35.6
Sering	9	20.0
Kadang-kadang	13	28.9
Jarang	7	15.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (35,6 persen) mengatakan selalu, 9 orang (20,0 persen) mengatakan sering, 13 orang (28,9 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 7 orang (15,6 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa KPU sudah memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada pemilih.

Tabel 4.5

Tanggapan responden tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepada pemilih pemula dan masyarakat yang memang belum paham mengenai politik

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	16	35.6
Sering	10	22.2
Kadang-kadang	12	26.7
Jarang	7	15.6
Tidak pernah	0	0

Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>
--------	-----------	-------------

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepada pemilih pemula dan masyarakat yang memang belum paham mengenai politik, dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (35,6 persen) mengatakan selalu, 10 orang (22,2 persen) mengatakan sering, 12 orang (26,7 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 7 orang (15,6 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa KPU sudah memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepada pemilih pemula dan masyarakat yang memang belum paham mengenai politik.

Tabel 4.6 Tanggapan responden tentang KPU memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	16	35.6
Sering	8	17.8
Kadang-kadang	14	31.1
Jarang	7	15.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye, dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (35,6 persen) mengatakan selalu, 8 orang (17,8 persen) mengatakan sering, 14 orang (31,1 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 7 orang (15,6 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa KPU sudah memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye.



Tabel 4.7 Tanggapan responden tentang KPU menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	11	24.4
Sering	12	26.7
Kadang-kadang	15	33.3
Jarang	7	15.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat, dapat dilihat bahwa sebanyak 16 orang (35,6 persen) mengatakan selalu, 9 orang (20,0 persen) mengatakan sering, 13 orang (28,9 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 7 orang (15,6 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa KPU kadang-kadang menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat.

Tabel 4.8 Tanggapan responden tentang KPU mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	14	31.1
Sering	8	17.8
Kadang-kadang	12	26.7
Jarang	11	24.4
Tidak pernah	0	0

Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>
--------	-----------	-------------

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara, dapat dilihat bahwa sebanyak 14 orang (31,1 persen) mengatakan selalu, 8 orang (17,8 persen) mengatakan sering, 12 orang (26,7 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 11 orang (24,4 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa KPU sudah mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara.

Tabel 4.9 Tanggapan responden tentang KPU memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	11	24.4
Sering	7	15.6
Kadang-kadang	16	35.6
Jarang	11	24.4
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang KPU memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (24,4 persen) mengatakan selalu, 7 orang (15,6 persen) mengatakan sering, 16 orang (35,6 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 11 orang (24,4 persen) mengatakan jarang.

Dapat dikatakan bahwa KPU kadang-kadang memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

#### **4.3.2. Partisipasi politik perempuan (variabel Y)**

Partisipasi politik perempuan (variabel Y) merupakan variabel kedua yang berisi delapan pertanyaan, dan semuanya telah dijawab oleh responden sebanyak 45 orang. Berikut tanggapan responden terkait partisipasi politik perempuan.

Tabel 4.10 Tanggapan responden tentang ikut dalam diskusi politik tentang pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	13	28.9
Sering	10	22.2
Kadang-kadang	18	40.0
Jarang	4	8.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam diskusi politik tentang pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 13 orang (28,9 persen) mengatakan selalu, 10 orang (22,2 persen) mengatakan sering, 18 orang (40,0 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 4 orang (8,9 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden kadang-kadang ikut dalam diskusi politik tentang pemilihan kepala daerah.

Tabel 4.11 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
---------	-----------	----------------

Selalu	11	24.4
Sering	13	28.9
Kadang-kadang	18	40.0
Jarang	3	6.7
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (24,4 persen) mengatakan selalu, 13 orang (28,9 persen) mengatakan sering, 18 orang (40,0 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 3 orang (6,7 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden kadang-kadang ikut dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah.

Tabel 4.12 Tanggapan responden tentang membentuk dan bergabung dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	12	26.7
Sering	15	33.3
Kadang-kadang	13	28.9
Jarang	5	11.1
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang membentuk dan bergabung dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (26,7 persen) mengatakan selalu, 15 orang (33,3 persen) mengatakan sering, 13 orang (28,9 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 5 orang (11,1 persen) mengatakan jarang. Dapat

dikatakan bahwa responden sering membentuk dan bergabung dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah.

Tabel 4.13 Tanggapan responden tentang ikut aktif berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan calon kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	10	22.2
Sering	10	22.2
Kadang-kadang	20	44.4
Jarang	5	11.1
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut aktif berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan calon kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (22,2 persen) mengatakan selalu, 10 orang (22,2 persen) mengatakan sering, 20 orang (44,4 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 5 orang (11,1 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden kadang-kadang ikut aktif berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan calon kepala daerah.

Tabel 4.14 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan pengajuan sikap terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	11	24.4

Sering	15	33.3
Kadang-kadang	13	28.9
Jarang	6	13.3
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam kegiatan pengajuan sikap terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang (24,4 persen) mengatakan selalu, 15 orang (33,3 persen) mengatakan sering, 13 orang (28,9 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 6 orang (13,3 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden sering ikut dalam kegiatan pengajuan sikap terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tabel 4.15 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan demonstrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	12	26.7
Sering	14	31.1
Kadang-kadang	12	26.7
Jarang	7	15.6
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam kegiatan demonstrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (26,7 persen) mengatakan selalu, 14 orang (31,1 persen) mengatakan sering, 12 orang (26,7 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 7 orang (15,6 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan

bahwa responden sering ikut dalam kegiatan demonstrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tabel 4.16 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan konfrontasi dengan pendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	14	31.1
Sering	9	20.0
Kadang-kadang	18	40.0
Jarang	4	8.9
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam kegiatan konfrontasi dengan pendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 14 orang (31,1 persen) mengatakan selalu, 9 orang (20,0 persen) mengatakan sering, 18 orang (40,0 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 4 orang (8,9 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden kadang-kadang ikut dalam kegiatan konfrontasi dengan pendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Tabel 4.17 Tanggapan responden tentang ikut dalam kegiatan mogok pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Pilihan	Frekuensi	Persentase (%)
Selalu	12	26.7
Sering	13	28.9
Kadang-kadang	15	33.3
Jarang	5	11.1
Tidak pernah	0	0
Jumlah	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel tentang ikut dalam kegiatan mogok pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (26,7 persen) mengatakan selalu, 13 orang (28,9 persen) mengatakan sering, 15 orang (33,3 persen) mengatakan kadang-kadang, dan 5 orang (11,1 persen) mengatakan jarang. Dapat dikatakan bahwa responden kadang-kadang ikut dalam kegiatan mogok pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

#### 4.4. Hasil Uji Statistik

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Setelah melakukan uji analisis regresi terhadap dua variabel penelitian, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.18 Coefficients peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.339	1.912		3.839	.000
PERAN KPU (variabel X)	1.041	.086	.878	12.057	.000

a. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (variabel Y)

Pada tabel coefficients tersebut dapat dilihat hasil koefisien peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan, sehingga dapat dibuat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b \cdot X$$



$$\hat{Y} = 7,339 + 1,041 \cdot X$$

Konstanta sebesar 7,339 berarti bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X), maka nilai partisipasi politik perempuan (variabel Y) adalah 7,339. Koefisien regresi sebesar 1,041, berarti bahwa setiap penambahan (karena tanda +) satu skor atau nilai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) akan memberikan kenaikan skor sebesar 1,041.

Hipotesis yang diajukan, yakni:

Ha : peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ho : peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi regresi sederhana, bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas *Sig*, dengan ketentuan:

- a) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau  $(0,05 \leq Sig)$ , maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.
- b) Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* atau  $(0,05 \geq Sig)$ , maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

Pada kolom *Sig* (signifikansi) tabel 4.19, ternyata nilai probabilitas *Sig* = 0,000. Nilai sig. ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05  $(0,05 > 0,000)$ , maka Ho ditolak

dan  $H_a$  diterima. Artinya koefisien regresi adalah signifikan. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa:

$H_a$  : peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diterima.

Kemudian, untuk mengetahui hubungan dan jenis hubungan antara kedua variabel penelitian, maka dilakukan uji analisis korelasi product moment dengan bantuan program SPSS versi 20. Berikut hasil analisis korelasi antara kedua variabel penelitian.

Tabel 4.19 Tingkat korelasi dan determinasi antara peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partisipasi politik perempuan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 <sup>a</sup>	.772	.766	3.41372

Sumber: kuesioner diolah Maret tahun 2025

Pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa nilai korelasi disimbolkan dengan R yakni sebesar 0,878 (87,8 persen), dengan tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Untuk mengetahui determinasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) terhadap partisipasi politik perempuan (variabel Y), disimbolkan dengan R Square, yakni 0,772 atau 77,2 persen. Dengan demikian, dapat diterjemahkan bahwa 77,2 persen partisipasi politik perempuan (variabel Y) di Kecamatan Bolaang Uki, dapat diterangkan oleh peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X). Dengan demikian apabila peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

(variabel X) ditingkatkan kualitasnya, maka setiap unit kenaikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik perempuan (variabel Y) sebesar 0,772 atau 77,2 persen.

#### **4.5. Pembahasan**

Partisipasi perempuan dalam proses politik, seperti pemilihan kepala daerah merupakan wujud berjalan demokrasi yang baik. Penempatan perempuan sebagai subyek pembangunan nasional dapat dilakukan dengan mendorong upaya pelibatan perempuan dalam partisipasi politik dalam setiap proses demokrasi. Tentunya dalam hal ini, peran partai politik menjadi sangat penting karena eksistensi partai politik merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam segala aspek, termasuk partisipasi politik perempuan. Menurut Subair dan Titaley (2019), hal ini dikarenakan perempuan juga bagian warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, terutama pada dua hak demokratis yang telah mendasar dari perempuan, yaitu hak memilih dan hak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Di samping eksistensi partai politik, lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, dimana salah satu indikatornya ialah tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan proses demokrasi, seperti pemilihan umum kepala daerah. Peran KPU ini penting karena menurut Moad (2018:286) Komisi Pemilihan Umum

tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Peran KPU harus maksimal agar tidak terjadi masyarakat yang memilih untuk golput dalam pelaksanaan proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, yang sangat membutuhkan suara masyarakat, agar kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat karena mendapat dukungan suara yang besar dari warga masyarakatnya.

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, suara perempuan cukup menentukan bagi keterpilihan kepala dan wakil kepala daerah dengan jumlah suara perempuan sebanyak 23.311 pemilih. Kondisi ini tentunya memerlukan perhatian semua pihak, bukan saja partai dan calon kepala dan wakil kepala daerah, akan tetapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Peran KPU dapat dilihat sejak mulainya tahapan pemilihan umum calon kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, seperti pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok panitia pemungutan suara, memberikan sosialisasi tentang pemilihan kepala daerah kepada warga masyarakat, membuat selebaran atau surat pemberitahuan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat susunan daftar pemilih sementara dan tetap, membagikan kartu pemilih, mengadakan tempat pemungutan suara, mengatur jadwal kampanye para calon kepala daerah, pelaksanaan pemungutan suara, serta menetapkan hasil pemilihan atau pemenang pilkada. Menurut Dewi dan Sinaga (2022:38), salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi

politik masyarakat adalah peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bersosialisasi sistem pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan pilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum memainkan peran yang sangat penting di negara ini dalam mencapai demokrasi yang sedang berlangsung. Negara dengan sistem demokratis untuk memutuskan panduan adalah pilihan. Ini berarti bahwa semua pemandu dipilih oleh suara orang-orang dalam agenda pemilihan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan (variabel Y), sebesar 0,772 atau 77,2 persen. di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kecamatan Bolaang Uki dipilih karena memiliki pemilih perempuan paling banyak dari kecamatan lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pengaruh sebesar 0,772 atau 77,2 persen termasuk kategori tinggi berdasarkan tabel 3.1 interpretasi koefisien korelasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih mendapat tanggapan kurang maksimal dari responden pada aspek peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni KPU kurang maksimal menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat. KPU juga masih kurang maksimal memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan

dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemudian, KPU masih kurang mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara. Beberapa indikator yang kurang maksimal tersebut, tentunya akan berdampak pada keseluruhan kinerja KPU dalam upaya menimbulkan minat masyarakat, termasuk perempuan untuk aktif terlibat dalam keseluruhan proses pemilihan calon kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hasil studi Gandeguay (2023) (2023) terbatas pada pemungutan suara karena partisipasi politik perempuan dalam pemilihan masih rendah karena beberapa faktor, dan partisipasi politik perempuan secara aktif terlibat dalam kegiatan seperti pemilihan untuk memasukkan kebutuhan spesifik gender dalam berbagai kebijakan publik, dan untuk menciptakan peralatan spesifik gender. Hasil ini juga sesuai dengan Andrian, dkk (2020) Partisipasi politik perempuan dalam pilihan kepala daerah sangat tinggi. Wanita akan mengikuti jumlah kandidat potensial yang akan memilih manajer selama lima tahun ke depan, membuat perubahan yang disajikan oleh kandidat dalam persahabatan dan misi atas proses Demokrat selama pemilihan pengukur dan subintaker. Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perpecahan politik perempuan tetap fokus pada implementasi suara, tetapi representasi lembaga politik rendah. Peran perempuan dalam pemilihan tentu bukan hanya pemilih, tetapi juga cara berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu atau peserta pemilu. Banyak peraturan mendukung pekerjaan perempuan dalam pemilihan sebagai penyelenggara

dan peserta pemilihan. Dengan kata lain, hanya sejumlah besar pihak yang didukung untuk implementasi. Fauziah, dkk (2023) menyatakan bahwa masih ada celah dalam kaitannya dengan partisipasi dan ekspresi perempuan dalam struktur politik formal. Ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia. Partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan oleh hambatan budaya, struktural, dan spesifik gender yang terjadi tidak hanya di komunitas yang lebih luas, tetapi juga dalam politik dan pemerintahan itu sendiri. Putri (2016:31) dikatakan hal yang sama yang terjadi secara umum karena sikap tidak aktif dan apriori terhadap aktivitas dan kegiatan politik. Daripada mengambil bagian dalam partisipasi politik, orang lebih suka memberikan kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan, olahraga, klub sosial, dan hobi untuk mencapai manfaat nyata. Faktor lain yang terkait erat dengan partisipasi politik adalah tingkat pembentukan masyarakat, dan tingkat pendidikan masyarakat biasanya berbanding lurus dengan partisipasi dalam politik. Ini adalah ironi dari banyak negara berkembang yang masih memiliki tingkat kompetensi masyarakat yang rendah dan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda politik yang umumnya rendah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, dapat ditarik kesimpulan dan saran, yakni:

#### **5.1 Kesimpulan**

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X) berpengaruh terhadap partisipasi politik perempuan (variabel Y) pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebesar 0,772 atau 77,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran KPU selaku penyelenggara pilkada sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada beberapa indikator peran KPU, yakni KPU kurang maksimal menggunakan bermacam alat peraga dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat, juga masih kurang maksimal memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, dan masih kurang mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Disisi lain, tingkat partisipasi politik perempuan dalam pilkada, juga sudah baik, namun mayoritas perempuan hanya berpartisipasi dalam pemberian suara pada calon kepala dan wakil kepala daerah.

#### **5.2 Saran**



- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada perempuan tentang pentingnya dukungan mereka dalam bentuk partisipasi dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal penggunaan alat peraga dan penyebaran informasi pilkada di media massa.
- 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan harus berupaya mengefektifkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait pilkada. Dalam mengefektifkan sosialisai dan penyuluhan tersebut sebaiknya lebih melibatkan lagi organisasi kemasyarakatan di setiap desa dan kelurahan, seperti karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, hingga tingkat RT dan RW, agar jangkauan komunikasi menjadi lebih luas lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Banna, Hasan. 2002. Figur Pemuda Islam. Cahaya Press. Jakarta.
- Andrian, dkk. 2020. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Pasir Batang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya). MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 4(2), 105-118, Volume 4 N0.2, Agustus 2020.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Arsito. 2004. Tradisi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Yang Demokratis.
- Budiardjo, Miriam. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dewi, Lintang Yunisha, dan Sinaga, Hizkia Laritza Novelina. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 8, Nomor 1, Mei 2022, pp. 36-48.
- Erni P, Maria. 2024. Pentingnya Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen. Dignity Indonesia.
- Fauziah, Marsyifa Novia, dkk. 2023. Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Formal. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 49, No. 1, Mei 2023: 12 - 22p-ISSN: 0216-4019 e-ISSN: 2614-025X.
- Gandeguay, Juan Kahlil. 2023. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah. sdaf Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Program Studi Politik Indonesia Terapan.

- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hariyanti, H., dkk. 2018. Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 15(1).
- Ikmal, Moh., dan Arifin, Mohammad. 2023. Model Penguatan Partisipasi Politik Perempuan Demi Partai Politik Responsif Gender. Migrasi. Yogyakarta.
- Khairuddin. 2002. Pembangunan Masyarakat. PT Gramedia. Jakarta.
- Lestari, Suci Indah, dan Hertanto. 2024. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu(Kada) 2024 di Provinsi Lampung. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No. 2, 2024.
- Mas'ood, Mohtar C. M. 2017. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Megawati, dan Padang, Andi Tenri. 2020. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. Siyasatuna | Volume 1 Nomor 3 September 2020.
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. Pembangunan Masyarakat. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nugroho, Dian Ade, dan Sukmariningsih, Retno Mawarini. 2020. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. Jurnal Juristic, Volume 1 | No. 01 | April 2020.
- Putri, Masleka Pratama. 2016. Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. eJournal Ilmu-Komunikasi, 2016, 4 (1) : 30 - 43 ISSN 0000-0000 , ejournal.ilkom.fisip-unmul.org.
- Ramadhani, dkk. 2022. Pengantar Ilmu Politik. Widina Bhakti Persada. Bandung.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz. 2005. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin Solo: Era Intermedia.
- Subair, dan Titaley, Paulus. 2019. Menjaga Hak Pilih Di Wilayah Sengketa Tapal

Batas Kabupaten Maluku Tengah Dan Kabupaten Seram Bagian Barat”, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Perihal Pelaksanaan Hak Politik, 2019, 147–76.

Sudarsono, Achmad Budinaa. 2019. Perempuan-Perempuan Politik Perjalanan Politik Perempuan di Indonesia.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung.

Surbakti, Ramlan. 2016. Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo. Jakarta.

Suropati, M. Untung. 2023. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik dalam Rangka Konsolidasi Demokrasi. Lembaga Ketahanan Nasional RI. Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2003. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta.

Warjiyati, S. 2016. Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27

**Dokumen:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Menkumham. Jakarta.

## Lampiran 1

### Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)

Nomor urut responden	1	2	3	4	5	6	Jumlah
1	4	4	3	4	4	4	23
2	2	2	3	2	2	2	13
3	5	5	5	5	5	5	30
4	3	3	3	4	4	3	20
5	3	2	3	3	2	2	15
6	2	2	2	3	2	2	13
7	3	3	3	2	3	3	17
8	4	4	4	5	4	3	24
9	2	2	2	3	3	2	14
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	3	3	2	3	2	16
12	4	3	3	3	3	3	19
13	3	3	3	3	2	3	17
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	3	2	3	3	3	17
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	5	5	5	4	5	28
18	4	4	5	4	3	5	25
19	5	5	4	5	4	3	26
20	5	4	5	5	5	5	29
21	3	4	3	4	2	2	18
22	2	4	2	3	2	2	15
23	4	5	4	4	3	4	24
24	2	2	2	2	3	3	14
25	5	5	5	5	5	5	30
26	3	3	3	3	2	2	16
27	3	3	4	3	3	3	19
28	3	3	3	3	2	3	17
29	2	2	2	2	2	2	12
30	4	3	4	3	3	3	20
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	4	5	4	4	4	26
33	5	5	5	5	5	5	30
34	4	4	4	4	4	3	23
35	3	3	3	4	4	4	21

36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	4	5	4	28
38	3	3	3	3	2	2	16
39	5	4	4	4	5	5	27
40	3	3	3	2	2	3	16
41	3	3	4	3	3	3	19
42	3	3	3	2	3	2	16
43	2	2	2	3	3	3	15
44	4	4	5	4	5	4	26
45	5	5	5	4	5	4	28

## Reliability

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.961	6

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
VAR00001	17.7111	24.528	<b>.925</b>	.880
VAR00002	17.7333	25.155	<b>.874</b>	.813
VAR00003	17.6889	24.719	<b>.885</b>	.824
VAR00004	17.7333	25.518	<b>.856</b>	.760
VAR00005	17.8667	24.482	<b>.861</b>	.780
VAR00006	17.9333	24.655	<b>.866</b>	.772

### Partisipasi Politik Perempuan (variabel Y)

[illegible]

29	2	2	2	2	2	2	2	3	17
30	4	4	4	3	4	3	4	4	30
31	5	5	5	5	5	5	5	5	40
32	3	3	3	3	4	4	4	4	28
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	5	5	5	4	5	5	5	4	38
35	5	5	4	5	5	5	5	5	39
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	4	5	5	4	5	4	4	5	36
38	3	3	2	3	3	2	3	3	22
39	5	4	4	5	4	4	3	4	33
40	3	3	3	3	3	4	3	3	25
41	4	4	4	4	4	3	3	3	29
42	3	3	4	3	3	4	4	3	27
43	3	3	3	2	3	2	3	3	22
44	5	4	4	5	4	5	4	5	36
45	4	4	4	4	4	4	4	4	32

### Reliability

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.964	8

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
VAR00001	25.8444	38.134	<b>.880</b>	.817
VAR00002	25.8444	38.771	<b>.897</b>	.825
VAR00003	25.8000	38.527	<b>.854</b>	.760
VAR00004	26.0000	38.455	<b>.876</b>	.799
VAR00005	25.8667	38.573	<b>.835</b>	.752
VAR00006	25.8667	37.845	<b>.856</b>	.776
VAR00007	25.8222	38.377	<b>.839</b>	.753



**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation
VAR00001	25.8444	38.134	<b>.880</b>	.817
VAR00002	25.8444	38.771	<b>.897</b>	.825
VAR00003	25.8000	38.527	<b>.854</b>	.760
VAR00004	26.0000	38.455	<b>.876</b>	.799
VAR00005	25.8667	38.573	<b>.835</b>	.752
VAR00006	25.8667	37.845	<b>.856</b>	.776
VAR00007	25.8222	38.377	<b>.839</b>	.753
VAR00008	25.8444	38.453	<b>.850</b>	.768

**JUMLAH VARIABEL X DAN Y**

<b>No. urut Responden</b>	<b>Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)</b>	<b>Partisipasi Politik Perempuan (variabel Y)</b>
1	23	27
2	13	21
3	30	40
4	20	28
5	15	23
6	13	20

7	17	22
8	24	34
9	14	19
10	30	40
11	16	24
12	19	25
13	17	21
14	18	27
15	17	26
16	30	30
17	28	34
18	25	37
19	26	32
20	29	40
21	18	32
22	15	28
23	24	34
24	14	18
25	30	40
26	16	23
27	19	26
28	17	25
29	12	17
30	20	30
31	30	40
32	26	28
33	30	40
34	23	38
35	21	39
36	30	40
37	28	36
38	16	22
39	27	33
40	16	25
41	19	29
42	16	27
43	15	22
44	26	36
45	28	32

**Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)**

## Frequency Table

nomor 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	15.6	15.6	15.6
	3.00	13	28.9	28.9	100.0
	4.00	9	20.0	20.0	71.1
	5.00	16	35.6	35.6	51.1
	Total	45	100.0	100.0	

nomor 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	15.6	15.6	15.6
	3.00	12	26.7	26.7	100.0
	4.00	10	22.2	22.2	73.3
	5.00	16	35.6	35.6	51.1
	Total	45	100.0	100.0	

nomor 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	15.6	15.6	15.6
	3.00	14	31.1	31.1	100.0
	4.00	8	17.8	17.8	68.9
	5.00	16	35.6	35.6	51.1
	Total	45	100.0	100.0	

nomor 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	15.6	15.6	15.6
	3.00	15	33.3	33.3	48.9
	4.00	12	26.7	26.7	75.6
	5.00	11	24.4	24.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

**nomor 5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	24.4	24.4	24.4
	3.00	12	26.7	26.7	75.6
	4.00	8	17.8	17.8	73.3
	5.00	14	31.1	31.1	55.6
	Total	45	100.0	100.0	

**nomor 6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	24.4	24.4	24.4
	3.00	16	35.6	35.6	60.0
	4.00	7	15.6	15.6	75.6
	5.00	11	24.4	24.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

**Partisipasi Politik Perempuan (variabel Y)**  
**Frequency Table**

**nomor 1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	8.9	8.9	8.9
	3.00	18	40.0	40.0	48.9
	4.00	10	22.2	22.2	71.1
	5.00	13	28.9	28.9	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

**nomor 2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	6.7	6.7	6.7
	3.00	18	40.0	40.0	46.7
	4.00	13	28.9	28.9	75.6
	5.00	11	24.4	24.4	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

**nomor 3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	11.1	11.1	11.1
	3.00	13	28.9	28.9	40.0
	4.00	15	33.3	33.3	73.3

5.00	12	26.7	26.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**nomor 4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	5	11.1	11.1	11.1
3.00	20	44.4	44.4	55.6
4.00	10	22.2	22.2	77.8
5.00	10	22.2	22.2	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**nomor 5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	6	13.3	13.3	13.3
3.00	13	28.9	28.9	42.2
4.00	15	33.3	33.3	75.6
5.00	11	24.4	24.4	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**nomor 6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	7	15.6	15.6	15.6

3.00	12	26.7	26.7	42.2
4.00	14	31.1	31.1	73.3
5.00	12	26.7	26.7	100.0
Total	45	100.0	100.0	

**nomor 7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	8.9	8.9	8.9
	3.00	18	40.0	40.0	48.9
	4.00	9	20.0	20.0	68.9
	5.00	14	31.1	31.1	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

**nomor 8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	11.1	11.1	11.1
	3.00	15	33.3	33.3	44.4
	4.00	13	28.9	28.9	73.3
	5.00	12	26.7	26.7	100.0
	Total	45	100.0	100.0	

## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PERAN KPU (variabel X) <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK  
PEREMPUAN (variabel Y)

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.878 <sup>a</sup>	.772	.766	3.41372	1.561

a. Predictors: (Constant), PERAN KPU (variabel X)

b. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (variabel Y)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------



1	Regression	1694.011	1	1694.011	145.365	.000 <sup>a</sup>
	Residual	501.101	43	11.654		
	Total	2195.111	44			

a. Predictors: (Constant), PERAN KPU (variabel X)

b. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (variabel Y)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.339	1.912		3.839	.000
	PERAN KPU (variabel X)	1.041	.086	.878	12.057	.000

a. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (variabel Y)

#### Coefficient Correlations<sup>a</sup>

Model		PERAN KPU (variabel X)
1	Correlations	PERAN KPU (variabel X)
		1.000
	Covariances	PERAN KPU (variabel X)
		.007

a. Dependent Variable: PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (variabel Y)

## **KUESIONER PENELITIAN**

Pengaruh Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

### **I. Petunjuk pengisian kuesioner**

Baca dan pahami pertanyaan yang tersedia, serta berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Bapak dan Ibu paling sesuai dengan pendapat sendiri.

## II. Daftar Pertanyaan

### Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) (variabel X)

1. KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, mulai dari pengenalan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, sampai kegiatan evaluasi hasil pemilihan kepala daerah

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

2. KPU memperkenalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kepada pemilih pemula dan masyarakat yang memang belum paham mengenai politik

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

3. KPU memberikan informasi proses pelaksanaan pilkada melalui alat peraga kampanye

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

4. KPU menggunakan bermacam alat peraga, seperti spanduk, banner, baliho, billboard, videotron, dan umbul-umbul dalam memperkenalkan proses pilkada kepada masyarakat

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah
--------	--------	---------------	--------	--------------

5. KPU mengadakan sosialisasi melalui media massa tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti mengenai hak pilih, proses pemilihan, hingga tahapan perhitungan suara

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

6. KPU memberikan informasi tentang pentingnya hak suara, konsekuensi dari setiap pilihan, serta kesadaran akan dampak politik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat

A	B	C	D	E
Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah

### **Partisipasi Politik Perempuan (variabel Y)**

1. ikut dalam diskusi politik tentang pemilihan kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

2. ikut dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

3. membentuk dan bergabung dalam tim pemenangan salah satu calon kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

4. ikut aktif berkomunikasi individual dengan pejabat politik dan calon kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

5. ikut dalam kegiatan pengajuan sikap terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

6. ikut dalam kegiatan demonstrasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

7. ikut dalam kegiatan konfrontasi dengan pendukung salah satu pasangan calon pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

8. ikut dalam kegiatan mogok pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah

a	b	c	d	e
selalu	sering	kadang-kadang	jarang	tidak pernah

**Terima kasih**

# FISIP09 Unisan

## Adisti Gobel PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA P...

 ILMU PEMERINTAHAN 1-2024

 Fak. Ilmu Sosial & Politik

 LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

Submission ID

trn.oid::1.3225973954

58 Pages

Submission Date

Apr 23, 2025, 6:37 PM GMT+7

9,514 Words

Download Date

Apr 23, 2025, 6:41 PM GMT+7

62,633 Characters

File Name

SKRIPSI\_ADISTY\_GOBEL\_1.doc

File Size

370.5 KB




# 16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

## Top Sources

- 0%  Internet sources
- 14%  Publications
- 10%  Submitted works (Student Papers)

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

0% Internet sources  
 14% Publications  
 10% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Pendidikan Indonesia	1%
2	Publication	
	Adelia Adelia, Hendra Saputra, Sakdon Sakdon, Tri Kurniawan. "PERAN BADAN PE...	1%
3	Publication	
	Farida Hanum Nst. "PERANAN MOTIVASI DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS ...	1%
4	Student papers	
	LL Dikti IX Turnitin Consortium	1%
5	Student papers	
	Universitas Negeri Makassar	<1%
6	Publication	
	Admin Admin. "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM...	<1%
7	Student papers	
	Universitas Pamulang	<1%
8	Student papers	
	Academic Library Consortium	<1%
9	Publication	
	Dian Ade Nugroho, Retno Mawarini Sukmariningsih. "PERANAN KOMISI PEMILIH...	<1%
10	Publication	
	Afra Khairunnisa Bangkiang, Reny Syafriny, Frits O. P. Siregar. "Implementasi CH...	<1%
11	Student papers	
	Universitas Negeri Jakarta	<1%

12	Publication	Adi Akmal. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemen...	<1%
13	Publication	Suparno Suparno. "PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI KA...	<1%
14	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1%
15	Student papers	Universitas Mulawarman	<1%
16	Publication	Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo. "Pemenuhan Hak Politik Perempuan ...	<1%
17	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta	<1%
18	Student papers	Sriwijaya University	<1%
19	Publication	Elly Hasan Sadeli, Razif Algiffary Sukma, Wildan Nurul Fajar, Efi Miftah Faridli. "Pe...	<1%
20	Publication	Riyanto Riyanto. "DAMPAK PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM INTERAKSI PEM...	<1%
21	Student papers	Southville International School and Colleges	<1%
22	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
23	Student papers	Universitas Pancasila	<1%
24	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
25	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%



26	Student papers	University of Wollongong	<1%
27	Publication	Winda Arisandi Situmorang, Hapni Laila Siregar. "Pengaruh Kompetensi Kepribad...	<1%
28	Publication	Bella Safitri, Ahmad Chumaedy, Toddy Aditya, Yusuf Fadli. "STRATEGI KOMISI PE...	<1%
29	Publication	Miftahul Khairani, Sukmawati Sukmawati, Nasrun Nasrun. "Pengaruh Model Pem...	<1%
30	Publication	Ahmad Izza Muttaqin. "Partisipasi Masjid Dalam Mendorong Tata Kelola Sampah ...	<1%
31	Student papers	Cerritos College	<1%
32	Student papers	Hialeah Gardens Senior High School	<1%
33	Publication	Winston · Pontoh. "Goodwill No. 1 Vol. 4 Juni 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DA...	<1%
34	Publication	Andriana Andriana, Sitti Rahmawati Arfah, Nur Wahid, Syukri Syukri, Nur Apriani ...	<1%
35	Student papers	Politeknik Pariwisata Lombok	<1%
36	Publication	Asiyah Asiyah, Andri Astuti, Nuraini Nuraini. "ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PER...	<1%
37	Publication	Muhammad Ihsan. "Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik ...	<1%





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001  
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp ( 0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 053/FISIP-UNISAN/S-BP/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si  
NIDN : 0930048307  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : ADISTY GOBEL  
NIM : S2121010  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pengaruh Peran Komisi Pemilihan Umum ( KPU)  
Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di  
Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **16%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI**

dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan

**Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si**  
NIDN. 0943027101

Gorontalo, 20 April 2025

Tim Verifikasi

**Swastiani Dunggio, S.IP., M.Sii**  
NIDN. 0930048307

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

DF







KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 388/PIP/B.04/LP-UIG/2025  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,

Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Selatan

di -

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Adisty Gobel  
NIM : S2121010  
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : Pengaruh peran komisi pemilihan umum (KPU) terhadap partisipasi politik perempuan di kecamatan Bolaang Uki  
Lokasi Penelitian : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Selatan

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal 15/02/2025

Ketua Lembaga Penelitian

  
Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN: 0929117202



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/HM.03.4.-Kt/7111/2025

KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Ini Menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo atas Nama:

Nama : Adisty Gobel  
NIM : S2121010  
Fakultas : Ilmu sosial Dan Ilmu politik  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Judul penelitian : PENGARUH PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

Telah Melakukan Penelitian di Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

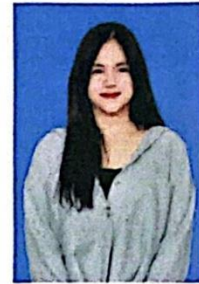
Stanly E. Kakunsi

Tembusan:

1. Arsip



## RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : ADISTY GOBEL  
Nim : S2121010  
Tempat Tanggal Lahir : Toluaya, 21-11-2002  
Ayah : Fulman Gobel  
Ibu : Novritha Ointu  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilm Pemerintahan  
Jenjang : S1  
Judul Skripsi : PENGARUH PERAN KOMISI PEMLIHAN UMUM  
(KPU) TERHADAP PARTISIPASI POLITIK  
PEREMPUAN DI KECAMATAN BOLAANG UKI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

SEKOLAH	MASUK/LULUS
SD NEGERI TOLUAYA	2008-2015
SMP NEGERI 1 BOLAANG UKI	2015-2018
SMA NEGERI 2 LIMBOTO	2018-2021
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	2021-2025